

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintarto, R. (1983). *Interaksi Desa-Kota*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Budi, S. D. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Medan: CV. Manhaji Medan dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Dwijayanto, Agus. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadisuprpto, Hartono. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hernandez Caroline. (1999). *Governance, Civil Society, And Democracy*, Jakarta.
- Hotma, P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo Sudikno. (2004). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Rahyunir Rauf & Maulidiah. (2015). *Pemerintahan Desa*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Ramlan & Sihobing. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: Enam Media.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UIL.
- Rohman Abd. & Willy Tri Hardianto. (2019). *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*, Malang: Intrans Publishing.
- Sulistiyono Adi & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group.
- Wijaya., Emiliana S., & Aris. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Demak: Pustaka Magister.
- Wijayanta Tata & Firmansyah Hery. (2013). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*, Yogyakarta: Medpress digital.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223.

Jurnal

Abdul Rohman. (2020). *Politik Birokrasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkades*. *Indonesian Governance Journal*, ISSN 2721-1991 Vol. 03 No.2, Oktober, 134.

Atie Rachmiatie., Dadi Ahmadi., & Ema Khotimah. (2015). *Dinamika Transparansi Dan Budaya Badan Publik Pasca Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Tentang Good Governance Dan Clean Governance Badan Publik Seindonesia Dalam Meningkatkan Kualitasnya Sebagai Badan Publik Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008 Di*

Provinsi JABAR Dan KALBAR). *SOSIOHUMANIORA* Vol. 18 No. 3 November 2015, 271.

Marcella J. Kapojos. (2022). *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangk a Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Lex et societatis vol. 10 No. 1 Januari 2022, 56-59.*

Skripsi

Dinanti Alivia Miranda, 2021. *“Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi”*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Muh. Saleh, 2020. *“Disparitas Putusan Hakim Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram)”*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani Selong.

Rury Mutia Dewi, 2021. *“Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)”*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Septia Ardianto, 2018. *“Penyelesaian Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa: Kajian Putusan PTUN Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG”*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Septi Piyola, 2021. *“Analisis putusan PTUN Pekanbaru Nomor 39/G/2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Yesa Putriani, 2021. *“Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Internet

Ani, R. (2022, September 8). Pengertian Pemerintah Pusat dan Strukturnya. Diakses 10 Mei 2023, Dari Kompas.Com:

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/193000269/pengertian-pemerintah-pusat-dan-strukturnya?page=all>

Dwi, A. P. (2020, Mei 20). *Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Diakses 3 Januari 2023, Dari Ombudsman Republik Indonesia:

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaahpengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>

Silmi, N. U. (2021, maret 19). *Level Pemerintahan Terendah Di Indonesia*. Diakses 28 Desember 2022, Dari Kompas.Com:

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/19/154247769/level-pemerintahan-terendah-di-indonesia>

Sofian, E. (2005, Desember 26). *Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama*. Diakses 27 Januari 2023,

<http://www.sofian.staffugm.ac.id/artikel/membangungood-governance>

